

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang di Kejaksaan Negeri Banyumas serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang di Kejaksaan Negeri Banyumas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum suatu fenomena. Jenis penelitian yaitu penelitian doktrinal yang mengumpulkan data-data sekunder dalam memperoleh data yang mendukung bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder terdiri atas literatur dan wawancara. Kejaksaan Negeri Banyumas merupakan salah satu lembaga penegak hukum, yang dimana dalam proses penegakan hukum harus sejalan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas adalah Pelayanan pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang, dimana denda pidana lalu lintas tersebut merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digolongkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kejaksaan Negeri Banyumas mengoptimalkan Pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan perubahan dalam sistem pembayaran tilang secara elektronik melalui E-Tilang. Namun, pada prakteknya masih banyak dari masyarakat yang belum memahami tentang E-Tilang dan masih melakukan pembayaran denda secara tunai. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Pelayanan pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang di Kejaksaan Negeri Banyumas secara tunai (*Cash*) dan melalui Bank/Kantor Pos/Tokopedia/Ovo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pelayanan pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang di Kejaksaan Negeri Banyumas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembayaran denda E-Tilang melalui Bank/Kantor Pos/*Mobile Banking (M-Banking)* atau aplikasi *e-commerce* Tokopedia.

Kata kunci : Kejaksaan RI, Pelayanan, Penegakan Hukum, Denda, E-Tilang

ABSTRACT

This study was conducted to determine the implementation of the E-Tilang Fine Payment Service at the Kejaksaan Negeri Banyumas and to find out what factors were obstacles in the implementation of the E-Tilang Fine Payment Service at the Kejaksaan Negeri Banyumas. The approach method used in this research is normative juridical with a qualitative research approach that focuses on the general principles of a phenomenon. The type of research is doctrinal research which collects secondary data in obtaining supporting data. Primary legal materials are statutory regulations and secondary legal materials consist of literature and interviews. Kejaksaan Negeri Banyumas is one of the law enforcement agencies, which in the process of law enforcement must be in line with the services provided to the community. One of the services provided by the Kejaksaan Negeri Banyumas is the E-Tilang Fine Payment Service, where the traffic fine is a source of state revenue which is classified as Non-Tax State Revenue. Kejaksaan Negeri Banyumas optimizes services to the community by making changes to the electronic ticket payment system through E-Tickets. However, in practice there are still many people who do not understand about E-Tilang and still pay fines in cash. The results of this study are the implementation of the E-Tilang Fine Payment Service at the Kejaksaan Negeri Banyumas in cash (Cash) and through the Bank/Post Office/Tokopedia/Ovo in accordance with Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, Law of the Republic of Indonesia Number 11 2021 concerning the Indonesian Prosecutor's Office, Regulation of the Indonesian Supreme Court Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Traffic Violation Cases, the inhibiting factor in the Implementation of E-Tilang Fine Payment Services at the Kejaksaan Negeri Banyumas is the lack of public understanding of the mechanism for paying E-ticket fines through banks. /Post Office/Mobile Banking (M-Banking) or the e-commerce application Tokopedia

Keywords: Kejaksaan RI, Services, Law Enforcement, Fines, E-Tilang